EFEKTIVITAS PROGRAM AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Rahmattafiyanto
NPP. 33.0473
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: rahmat.tafiyanto96@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Djonny Pabisa, S.Pd., M.Pd.
Email: djonnypabisa@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The low achievement of Digital Population Identity (IKD) activation in Semarang Regency indicates that the implementation of the population administration digitalization program has not run optimally. Of 825,454 residents who have completed electronic identity card (KTP-el) recording, only 59,624 people or 7.06% have activated IKD, which is still far below the national target of 30%. While various studies have confirmed the effectiveness of digital identity programs in urban areas such as Bandung and Surabaya, limited empirical research has specifically examined the effectiveness of IKD activation in semi-urban kabupaten contexts such as Semarang Regency, which faces distinct digital literacy and infrastructure challenges.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of the IKD activation program in Semarang Regency using Budiani's (2007) effectiveness theory.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection was conducted through interviews with 8 informants, observation, and documentation. Data analysis was performed using NVivo 12 software (Salahudin, Nurmandi, & Loilatu, 2020).* ***Result:*** *The study found that across the four dimensions of Budiani's framework: (1) target accuracy — priority groups such as civil servants, students, and formal sector workers have been targeted, yet the elderly, low-educated populations, and remote-area residents remain difficult to reach; (2) program socialization — outreach has been conducted through social media, radio, schools, and mobile services, but intensity and public understanding remain limited; (3) program objectives — IKD has provided digital convenience for those who have activated it, but technical constraints, limited digital literacy, and incomplete integration with public services have restricted broader uptake; and (4) program monitoring — data-based monitoring and internal evaluation are in place, but have not yet succeeded in accelerating activation due to resource constraints and low public response.* ***Conclusion:*** *The IKD activation program in Semarang Regency has been implemented but has not yet been optimal, reflected by the activation achievement of only 7.06%, far below the national target of 30%. It is recommended to intensify socialization, expand mobile outreach services, integrate IKD with other public services, and strengthen staff capacity.*

Keywords: *program effectiveness; IKD; population administration; public service; digitalization*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian*/Research Gap*): Rendahnya capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa implementasi program digitalisasi administrasi kependudukan belum berjalan optimal. Sebanyak 825.454 penduduk telah melakukan perekaman KTP-el, namun yang telah aktivasi IKD baru mencapai 59.624 jiwa atau 7,06%, masih jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi efektivitas program digitalisasi kependudukan di daerah perkotaan seperti Bandung dan Surabaya, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara empiris mengkaji efektivitas aktivasi IKD di kabupaten semi-perkotaan seperti Kabupaten Semarang yang memiliki tantangan literasi digital dan infrastruktur yang berbeda. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program aktivasi IKD di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi NVivo 12. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ketepatan sasaran, kelompok potensial seperti ASN, pelajar, mahasiswa, dan pekerja formal telah diprioritaskan, namun kelompok lansia, masyarakat berpendidikan rendah, dan warga daerah terpencil masih sulit dijangkau. Pada dimensi sosialisasi program, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi melalui media sosial, radio, sekolah, dan jemput bola, namun intensitas dan pemahaman masyarakat masih terbatas. Pada dimensi tujuan program, IKD telah memberikan kemudahan akses dokumen kependudukan secara digital, tetapi kendala teknis, literasi digital yang rendah, dan belum optimalnya integrasi IKD dengan layanan publik lain membatasi pemanfaatannya. Pada dimensi pemantauan program, sistem monitoring berbasis data dan evaluasi internal telah dilakukan, namun belum mampu mendorong percepatan capaian secara signifikan. **Kesimpulan:** Program aktivasi IKD di Kabupaten Semarang telah berjalan namun belum optimal, tercermin dari capaian aktivasi yang baru mencapai 7,06%, jauh di bawah target nasional 30%. Disarankan untuk mengintensifkan sosialisasi, memperluas layanan jemput bola, mengintegrasikan IKD dengan layanan publik lainnya, dan memperkuat kapasitas SDM pelaksana.

Kata kunci: efektivitas program; IKD; administrasi kependudukan; pelayanan publik; digitalisasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi digital 4.0 telah mendorong transformasi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik. Indonesia dalam United Nations E-Government Survey 2024 meraih peringkat 64 di antara 193 negara anggota PBB, melompat 13 peringkat dari posisi 77 pada tahun 2022, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menerapkan transformasi digital pelayanan publik. Dalam upaya memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, pemerintah

memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sebagai bentuk inovasi (Hutasoit & Pribadi, 2023).

Salah satu inovasi strategis di bidang administrasi kependudukan adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penerapan IKD bertujuan untuk mendigitalisasi data kependudukan dan mempermudah akses layanan publik berbasis elektronik, sekaligus menghemat anggaran negara sekitar 50 hingga 100 miliar rupiah per tahun karena tidak diperlukan lagi pengadaan blangko KTP secara fisik (Permadi & Rokhman, 2023). Menurut Gatiningsih dkk. (2022) Digitalisasi dapat mempermudah pengelolaan data dan informasi kependudukan karena adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi membuat akses menjadi lebih mudah. Digitalisasi pemerintahan termasuk di dalamnya yaitu memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga tidak ada lagi elayanan yang bertele-tele, ketidakpastian serta ketidakterbukaan antara waktu dan biaya pelayanan Nababan & Situmorang (2023). Artinya digitalisasi pemerintahan seharusnya dapat membawa dampak positif bagi kualitas pelayanan publik, seperti bidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan data di Kabupaten Semarang dari 825.454 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el, hanya 59.624 jiwa yang telah melakukan aktivasi IKD atau sebesar 7,06% hal itu masih jauh di bawah target nasional 30%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target kebijakan dengan realisasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat dan jaringan internet, budaya pelayanan konvensional, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem digital kependudukan.

Kajian internasional menegaskan bahwa transformasi digital administrasi kependudukan bukan sekadar penggantian dokumen fisik dengan digital, melainkan merupakan perubahan menyeluruh yang berdampak pada efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik (Naghmouchi et al., 2025). Riskasari dan Ibrahim (2025) dalam kajian sistematisnya terhadap implementasi e-KTP dan digitalisasi dokumen di Indonesia menemukan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan digital aparatur, dan konsistensi reformasi birokrasi, di mana ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan nyata di Kabupaten Semarang. Di sisi lain, Chohan dan Hu (2022) membuktikan bahwa rendahnya kompetensi digital masyarakat merupakan hambatan utama dalam adopsi layanan e-government, dan program pelatihan ICT yang terpadu terbukti secara signifikan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam layanan digital pemerintah. Hal ini semakin diperkuat oleh temuan Duan dan Dong (2025) yang secara empiris membuktikan bahwa literasi digital adalah prediktor terkuat penggunaan e-government, terutama di kalangan masyarakat perdesaan. Latupeirissa et al. (2024) lebih lanjut menemukan bahwa proyek transformasi digital layanan publik berisiko memperparah ketimpangan sosial apabila tidak disertai dengan strategi inklusi digital yang memadai. Kondisi-kondisi tersebut memperkuat urgensi penelitian ini untuk mengkaji secara empiris efektivitas program aktivasi IKD di Kabupaten Semarang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan IKD telah berjalan cukup efektif di beberapa daerah perkotaan seperti Bandung (Sasongko, 2023) dan Surabaya (Wardani & Isbandono, 2024), serta pada inovasi layanan sejenis seperti Klampid New Generation (Alfianti & Wahyudi, 2024). Meskipun demikian, hasil tersebut belum tentu mencerminkan kondisi yang sama di daerah lain. Penelitian oleh Nabilla dan Prasetyawan (2023) di Kabupaten Gresik menemukan hambatan pada aspek sosialisasi dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan layanan daring, terutama akibat rendahnya literasi teknologi.

Meskipun beberapa penelitian telah menggunakan teori Budiani (2007) untuk mengkaji efektivitas program digital, belum ada yang secara spesifik meneliti efektivitas program aktivasi IKD sebagai program nasional di kabupaten semi-perkotaan seperti Kabupaten Semarang. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut berdasarkan empat dimensi menurut Budiani (2007): ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas program aktivasi IKD di Kabupaten Semarang sebagai dasar perumusan strategi percepatan digitalisasi administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah. Urgensi semakin kuat mengingat IKD difungsikan sebagai fondasi identitas digital dasar dalam ekosistem INA DIGITAL berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang menjadi kunci akses tunggal *(single sign-on)* berbagai layanan publik nasional. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah daerah akan kekurangan basis empiris yang kuat dalam merumuskan strategi peningkatan capaian aktivasi IKD, sehingga upaya percepatan berisiko tidak tepat sasaran dan kurang efektif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik efektivitas program digitalisasi administrasi kependudukan. Penelitian oleh Sasongko (2023) dalam penelitiannya berjudul Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung menggunakan teori implementasi George C. Edward III dan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Bandung memiliki kesiapan yang mencukupi untuk mengimplementasikan IKD, dan pelayanan IKD dapat diintegrasikan dengan inovasi yang telah ada. Namun demikian, tingkat penguasaan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan smartphone yang beragam membuat sosialisasi dan edukasi secara masif masih sangat diperlukan agar implementasi IKD dapat berlangsung efektif sesuai harapan.

Penelitian oleh Wardani dan Isbandono (2024) dengan judul Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital dalam Menunjang Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kelurahan Pagesangan menggunakan teori efektivitas Duncan dengan tiga indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program IKD di Kelurahan Pagesangan sudah cukup efektif,

meskipun masih menghadapi tantangan seperti tujuan program yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, keterbatasan perangkat masyarakat, dan program yang kurang diketahui masyarakat. Rekomendasi penelitian ini mencakup perluasan sosialisasi, peningkatan kemampuan petugas melalui pelatihan, dan optimalisasi saluran komunikasi.

Penelitian Alfianti dan Wahyudi (2024) dalam penelitiannya berjudul Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Wonokusumo menggunakan teori efektivitas Sutrisno dengan lima indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, serta metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation dalam proses administrasi kependudukan di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat dikatakan cukup efektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode yang digunakan, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, lokus penelitian, dan fokus kajian yaitu Klampid merupakan inovasi lokal Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan IKD merupakan program nasional, sehingga penelitian ini hadir untuk mengkaji efektivitas program nasional tersebut di tingkat daerah yang berbeda.

Penelitian oleh Nabilla dan Prasetyawan (2023)) dengan judul Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Aplikasi Poedak di Kabupaten Gresik) menggunakan teori efektivitas Budiani (2007) dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Poedak telah membantu mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gresik, tetapi efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat hambatan seperti rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan perangkat masyarakat; sementara faktor pendukungnya adalah sarana prasarana dan SDM aparatur.

Penelitian oleh Riskasari dan Ibrahim (2025) dalam artikelnya yang berjudul *"The Impact of Electronic Identity Cards and the Digitalization of Certificates on Public Service Effectiveness: A Literature Review"* menggunakan metode *systematic literature review* dengan pendekatan kualitatif terhadap 21 publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik melalui e-KTP, IKD, dan sertifikat digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik serta mendukung peningkatan kinerja ASN. Akan tetapi, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan digital ASN dan masyarakat, reformasi birokrasi, keamanan data, serta keterlibatan masyarakat.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Berbeda dengan penelitian Sasongko (2023) yang menggunakan teori implementasi George C. Edward III dengan metode studi pustaka di Kabupaten Bandung, penelitian ini menggunakan teori efektivitas Budiani (2007) dengan metode deskriptif kualitatif yang menghimpun data primer secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Berbeda pula dengan penelitian Wardani dan Isbandono (2024) serta Alfianti dan Wahyudi (2024) yang masing-masing menggunakan teori efektivitas Duncan dan teori efektivitas Sutrisno pada lokus inovasi layanan tingkat kelurahan/kota, yaitu IKD di Kelurahan Pagesangan dan Klampid New Generation di Kota

Surabaya, penelitian ini mengkaji efektivitas IKD sebagai program nasional pada level kabupaten semi-perkotaan, yakni Kabupaten Semarang, yang memiliki karakteristik tantangan literasi digital dan infrastruktur yang berbeda. Meskipun penelitian Nabilla dan Prasetyawan (2023) sama-sama menggunakan teori efektivitas Budiani (2007), objek penelitiannya adalah aplikasi inovasi lokal Poedak di Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian ini berfokus pada program nasional IKD yang berlaku seragam di seluruh Indonesia sehingga memiliki kompleksitas implementasi dan tantangan yang berbeda. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Riskasari dan Ibrahim (2025) yang menggunakan metode *systematic literature review* terhadap 21 publikasi, sedangkan penelitian ini menghimpun data primer secara langsung dari lapangan. Kebaruan lain dari penelitian ini yakni penggunaan analisis data berbantuan aplikasi NVivo 12 melalui *Word Frequency Query, Text Search Query (Word Tree),* dan *Hierarchy Chart*, yang belum digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan teori efektivitas menurut Budiani (2007).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memberikan penjelasan yang mendetail tentang efektivitas program aktivasi IKD tanpa melakukan pengujian hipotesis atau menyelidiki hubungan sebab-akibat secara mendalam. Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016:4), penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Dengan pendekatan induktif, penelitian ini bertujuan mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan data dan kondisi fakta yang terjadi di lapangan (Simangunsong, 2017).Teori yang digunakan adalah efektivitas program menurut Budiani (2007) yang meliputi empat dimensi: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 7 informan yang dipilih menggunakan dua teknik *sampling*, yaitu *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Informan kunci adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang PIAK, Operator Aktivasi IKD, serta 3 orang masyarakat pengguna layanan IKD sebagai penerima manfaat langsung program. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.

Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi NVivo 12 melalui tahapan reduksi data *(coding),* penyajian data berupa *Word Frequency Query (Summary), Text Search Query (Word Tree),* dan *Hierarchy Chart*, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Salahudin, Nurmandi, & Loilatu, 2020). Penelitian dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selama tiga minggu pada bulan Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas program aktivasi IKD di Kabupaten Semarang menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007) yang mencakup empat dimensi: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Analisis data dilakukan dengan bantuan NVivo 12 dan setiap dimensi disajikan dengan output NVivo untuk memperkuat kedalaman analisis.

3.1. Ketepatan Sasaran Program

Dimensi ketepatan sasaran menekankan bahwa suatu program dikatakan efektif apabila penerima manfaat yang dituju sesuai dengan kelompok target yang telah direncanakan. Dalam konteks aktivasi IKD, Disdukcapil Kabupaten Semarang telah menetapkan sasaran sesuai Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, dengan mengutamakan kelompok potensial seperti ASN, pelajar, mahasiswa, dan pekerja sektor formal yang memiliki literasi digital lebih baik.

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
kelompok	8	27	4,38
aktivasi	8	16	2,59
masyarakat	10	12	1,94
punya	5	9	1,46
penduduk	8	8	1,30
daerah	6	7	1,13
sekolah	7	7	1,13
sulit	5	7	1,13
digital	7	6	0,97
khusus	6	6	0,97
smartphone	10	6	0,97

Summary | Word Cloud | Tree Map | Cluster A

Gambar 3.1
***Word Frequency Query "Summary"* Dimensi Ketepatan Sasaran**

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

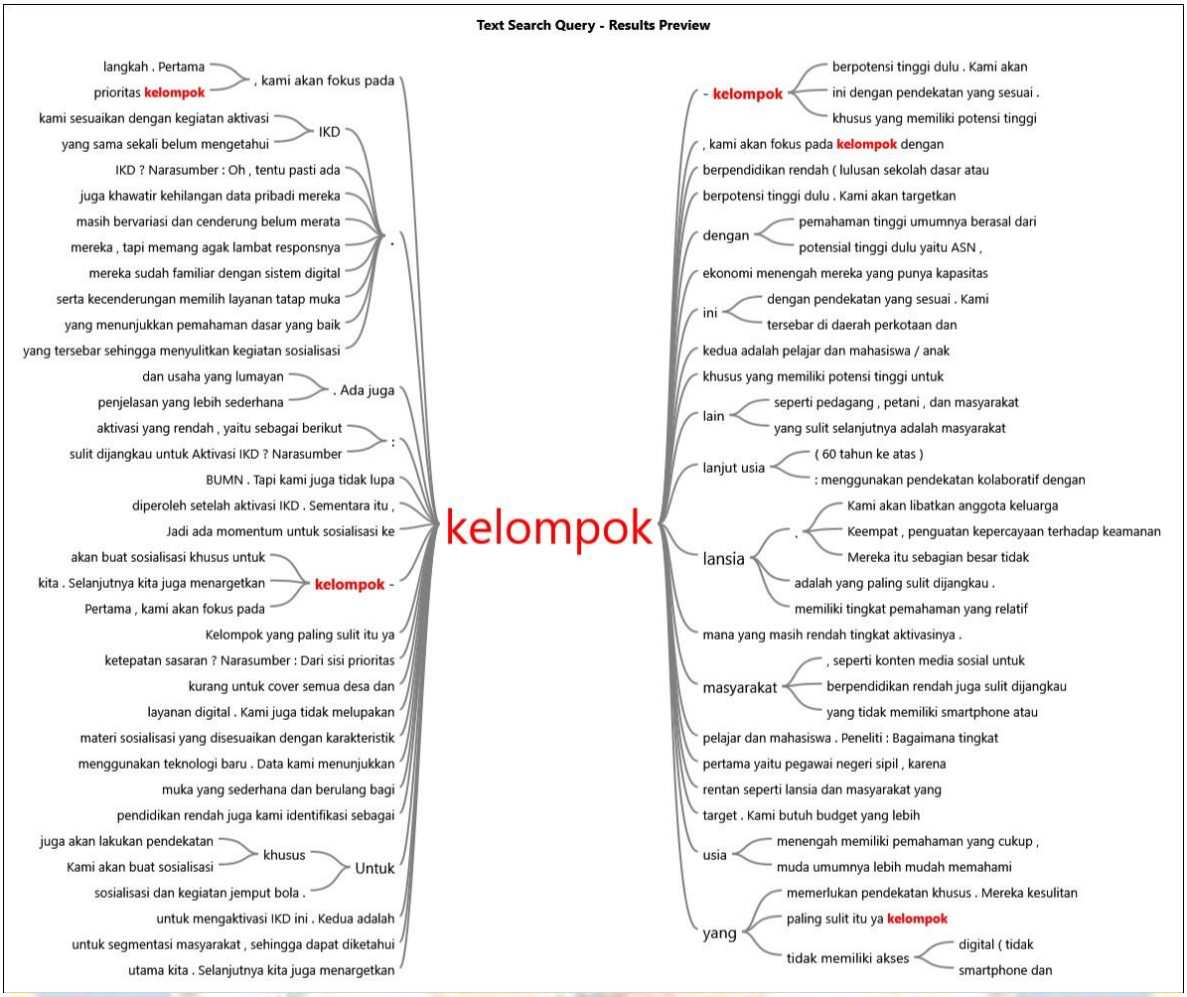

Gambar 3.2
***Text Search Query "Word Tree"* Dimensi Ketepatan Sasaran**

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa kata "Kelompok" mendominasi data dimensi ini dengan persentase 4,38%, diikuti kata "Aktivasi" (2,59%), "Masyarakat" (1,94%), dan "Penduduk" (1,30%). Hasil *Text Search Query* dengan kata kunci "Kelompok" divisualisasikan dalam *Word Tree* pada gambar 3.2 yang memperlihatkan keterkaitan dengan frasa seperti: ASN, pelajar dan mahasiswa, masyarakat lansia, masyarakat pedesaan, berpendidikan rendah, serta tidak memiliki smartphone. Visualisasi ini mengkonfirmasi bahwa implementasi aktivasi IKD di Kabupaten Semarang menggunakan pendekatan segmentasi sasaran yang membedakan kelompok berdasarkan potensi adopsi dan tingkat kesulitan jangkauan.

Berdasarkan hasil output NVivo tersebut, dominasi kata kelompok mengindikasikan bahwa segmentasi sasaran menjadi isu sentral dalam pelaksanaan program. Disdukcapil memprioritaskan ASN, pelajar, mahasiswa, dan pekerja sektor formal karena memiliki kemampuan digital lebih baik, sehingga diharapkan dapat menjadi motor penggerak percepatan capaian. Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa penetapan sasaran tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mulai menggunakan data profiling masyarakat. Namun demikian, kelompok lansia, masyarakat berpendidikan rendah, dan warga wilayah terpencil seperti Getasan, Jambu, dan Banyubiru masih sangat sulit

dijangkau. Kondisi ini terkonfirmasi dari data lapangan yang menunjukkan bahwa capaian tertinggi hanya 14,67% di Kecamatan Getasan, sedangkan terendah 2,36% di Kecamatan Jambu, dan tidak satu pun kecamatan yang mendekati target nasional 30%.

Tabel 1.1

Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Semarang Tahun 2025

No	Kondisi Kependudukan	Jumlah (Jiwa)
1	Penduduk Wajib KTP-el	838.660
2	Penduduk Sudah Rekam KTP-el	825.454
3	Penduduk yang Telah Aktivasi IKD	59.624

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 dari 825.454 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el, hanya 59.624 jiwa atau 7,06% yang telah mengaktivasi IKD. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran yang telah ditetapkan masih perlu diikuti strategi pelaksanaan yang lebih agresif untuk menjangkau kelompok yang lebih luas.

3.2. Sosialisasi Program

Dimensi sosialisasi program menekankan bahwa program akan berjalan efektif apabila informasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat sasaran. Disdukcapil Kabupaten Semarang telah melakukan sosialisasi melalui pendekatan langsung (jemput bola ke desa, sekolah, kampus, dan acara publik) maupun tidak langsung (media sosial instagram, youtube, radio lokal, banner, dan leaflet).

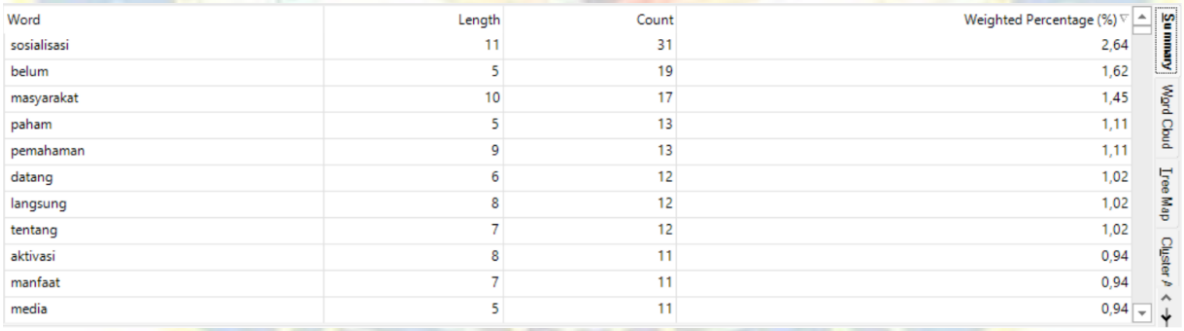

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
sosialisasi	11	31	2,64
belum	5	19	1,62
masyarakat	10	17	1,45
paham	5	13	1,11
pemahaman	9	13	1,11
datang	6	12	1,02
langsung	8	12	1,02
tentang	7	12	1,02
aktivasi	8	11	0,94
manfaat	7	11	0,94
media	5	11	0,94

Gambar 3.3

***Word Frequency Query "Summary"* Dimensi Sosialisasi Program**

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026



Gambar 3.4
Text Search Query "Word Tree" Dimensi Sosialisasi Program

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa kata "Sosialisasi" mendominasi dengan persentase 2,64%, diikuti kata "Belum" (1,62%), "Masyarakat" (1,45%), dan "Paham" (1,11%). Munculnya kata "Belum" dan "Paham" yang cukup dominan mengindikasikan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat aspek yang belum optimal terkait pemahaman masyarakat. Hasil *Text Search Query* dengan kata kunci "Sosialisasi" dalam *Word Tree* pada gambar 3.4 menunjukkan keterkaitan dengan frasa: berbagai cara langsung dan tidak langsung, media sosial, tim datang ke desa/kampus, video tutorial, radio lokal, banner, masyarakat kurang tertarik, dan belum terjadwal rutin. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai metode, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan pada aspek jangkauan, intensitas, dan penerimaan masyarakat.

Temuan NVivo di atas memperkuat hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sosialisasi belum terjadwal secara rutin dan sistematis. Kegiatan sosialisasi dilakukan minimal satu kali per bulan, sedangkan konten digital diperbarui 2–3 kali per bulan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah 1.019,27 km², 19 kecamatan, serta 208 desa dan 27 kelurahan, frekuensi tersebut masih jauh dari memadai. Selain itu, munculnya kata Paham pada output *Word Frequency* mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat menjadi isu sentral. Masyarakat, terutama kelompok lansia dan berpendidikan rendah, masih kesulitan menangkap informasi yang bersifat teknis. Hasil observasi menunjukkan hanya 6–10 orang yang melakukan aktivasi IKD per hari di kantor Disdukcapil, sebagai cerminan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap IKD.

3.3. Tujuan Program

Dimensi tujuan program menilai sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencakup kemudahan pelayanan setelah aktivasi, kepuasan masyarakat, dan pencapaian target aktivasi. IKD menyediakan berbagai fitur layanan administrasi kependudukan digital, mulai dari KTP digital, Kartu Keluarga, cetak biodata, hingga penerbitan akta kelahiran dan kematian.

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
masyarakat	10	20	2,38
aktivasi	8	18	2,14
pelayanan	9	11	1,31
aplikasi	8	8	0,95
petugas	7	8	0,95
kependudukan	12	7	0,83
dokumen	7	6	0,71
membawa	7	6	0,71
disdukcapil	11	5	0,59
handphone	9	5	0,59
praktis	7	5	0,59

Summary | Word Cloud | Tree Map | Cluster A

Gambar 3.5
***Word Frequency Query "Summary"* Dimensi Tujuan Program**

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026



Gambar 3.6
***Word Frequency Query "Word Tree"* Dimensi Tujuan Program**

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa kata "Masyarakat" mendominasi dengan persentase 2,38%, diikuti kata "Aktivasi" (2,14%), "Pelayanan" (1,31%), dan "Aplikasi" (0,95%). Kata "praktis", "dokumen", dan "handphone" juga cukup dominan, yang menunjukkan bahwa persepsi informan mengenai tujuan program IKD berfokus pada manfaat praktis bagi masyarakat dan kemudahan akses dokumen. Hasil Text Search Query dengan kata kunci "Masyarakat" dalam *Word Tree* pada gambar 3.6 memperlihatkan keterkaitan dengan frasa: mempermudah pelayanan adminduk, lebih praktis, belum semua pelayanan menerima IKD, butuh pendampingan, masyarakat puas, dan kendala teknis. Frasa "belum semua pelayanan menerima IKD" dan "butuh pendampingan" menjadi temuan penting yang menunjukkan

bahwa tujuan program telah mulai dirasakan, namun manfaatnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan implementasi di lapangan.

Hasil NVivo tersebut sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa IKD telah memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat yang telah mengaktivasi dan memiliki literasi digital memadai, terutama kalangan ASN dan mahasiswa. Namun bagi kelompok dengan literasi digital rendah, layanan digital justru menciptakan ketergantungan pada pendampingan petugas. Target nasional aktivasi IKD sebesar 30% masih jauh dari tercapai, dengan capaian Kabupaten Semarang baru 7,06% hingga tahun 2025. Data grafik perkembangan menunjukkan pertumbuhan yang melambat signifikan, di mana tahun 2024 tercatat penambahan 33.320 jiwa, sementara tahun 2025 hanya bertambah 18.564 jiwa, mengindikasikan semakin beratnya tantangan menjangkau kelompok yang tersisa.

3.4. Pemantauan Program

Dimensi pemantauan program menekankan bahwa suatu program dinilai efektif apabila pelaksanaannya diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Disdukcapil Kabupaten Semarang telah memiliki sistem monitoring berbasis dashboard real-time yang terhubung dengan sistem pusat, sehingga data aktivasi dapat dipantau per kecamatan secara harian, mingguan, dan bulanan.

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
aktivasi	8	23	1,93
layanan	7	15	1,26
masyarakat	10	15	1,26
kecamatan	9	10	0,84
evaluasi	8	9	0,76
pelayanan	9	9	0,76
pemerintah	10	9	0,76
sosialisasi	11	9	0,76
langsung	8	8	0,67
laporan	7	7	0,59
melalui	7	6	0,50

Summary | Word Cloud | Tree Map | Cluster A

Gambar 3.7
***Word Frequency Query "Summary"* Dimensi Pemantauan Program**

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

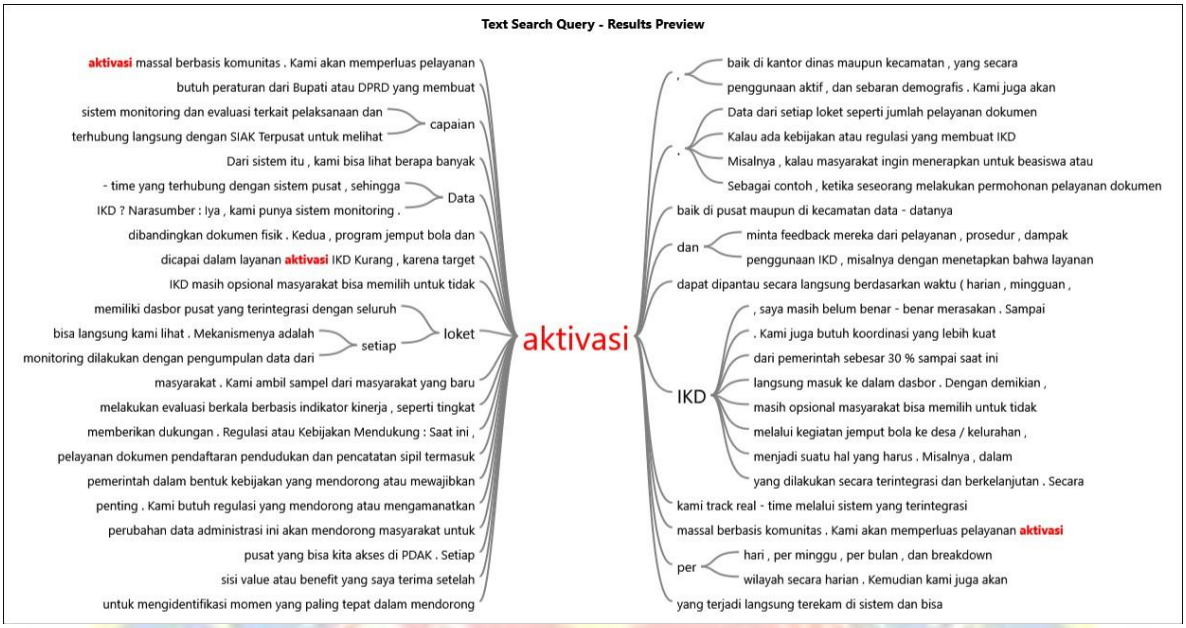

Gambar 3.8
***Word Frequency Query "Word Tree"* Dimensi Pemantauan Program**

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan NVivo 12, 2026

Hasil *Word Frequency Query* menunjukkan bahwa kata "Aktivasi" mendominasi dengan persentase 1,93%, diikuti kata "Layanan" (1,26%), "Masyarakat" (1,26%), dan "Kecamatan" (0,84%). Tingginya frekuensi kata kecamatan mengindikasikan bahwa pemantauan dilakukan hingga tingkat kecamatan, mencerminkan sistem monitoring yang berbasis data spasial. Hasil *Text Search Query* dengan kata kunci "Aktivasi" dalam *Word Tree* pada Gambar 3.8 memperlihatkan keterkaitan dengan frasa: dashboard real-time, laporan mingguan, rapat evaluasi, feedback masyarakat, terhubung dengan sistem pusat, jemput bola, regulasi pendukung, dan per kecamatan. Visualisasi ini menunjukkan bahwa pemantauan program dilakukan melalui kombinasi antara pengawasan digital, koordinasi kelembagaan, evaluasi berkala, dan pencarian solusi strategis, sehingga Disdukcapil tidak hanya menghitung jumlah aktivasi tetapi juga membaca penyebab rendahnya capaian dan merumuskan langkah perbaikan

Temuan NVivo tersebut dikonfirmasi oleh observasi lapangan terhadap tampilan dashboard laporan harian Disdukcapil Kabupaten Semarang yang memuat berbagai indikator layanan secara terintegrasi, termasuk capaian aktivasi IKD per kecamatan secara real-time. Per 10 April 2026, aktivasi tercatat 62.388 jiwa atau 7,61%, membuktikan sistem monitoring berbasis data aktual telah berjalan. Meskipun demikian, hasil pemantauan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi percepatan capaian karena masih terkendala keterbatasan anggaran, SDM, dan belum kuatnya integrasi IKD dengan layanan publik lain. Tingginya frekuensi kata masyarakat pada output NVivo memperlihatkan bahwa persepsi dan kepercayaan publik menjadi variabel penting yang harus dipantau secara berkelanjutan, bukan hanya angka aktivasi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat temuan Nabilla dan Prasetyawan (2023) yang mengkaji aplikasi Poedak di Kabupaten Gresik menggunakan teori Budiani, bahwa

digitalisasi layanan kependudukan masih menghadapi hambatan literasi digital dan sosialisasi yang belum optimal. Sama halnya dengan temuan Wardani dan Isbandono (2024), penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan program IKD sangat bergantung pada kapasitas pengguna dalam memanfaatkan teknologi, bukan semata-mata pada kesiapan sistem.

Berbeda dengan temuan Sasongko (2023) di Kabupaten Bandung yang menunjukkan capaian relatif lebih baik, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik semi-perkotaan Kabupaten Semarang dengan topografi beragam dan penduduk lansia yang mencapai 15,50% dari total penduduk menghadirkan tantangan tersendiri. Temuan ini sejalan dengan kajian Riskasari dan Ibrahim (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi kependudukan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan digital masyarakat, dan reformasi birokrasi. Naghmouchi et al. (2025) juga menemukan bahwa kerangka hukum dan perlindungan data memegang peran kunci, yang relevan dengan konteks kepercayaan publik terhadap IKD di Kabupaten Semarang. Output NVivo secara keseluruhan mengkonfirmasi bahwa isu kelompok sasaran, sosialisasi, kemudahan layanan, dan monitoring merupakan empat simpul utama yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas program.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Faktor penghambat utama meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat smartphone, jaringan internet yang tidak stabil di wilayah perdesaan, keterbatasan SDM pelaksana, serta belum kuatnya integrasi layanan. Latupeirissa et al. (2024) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci percepatan transformasi digital layanan publik yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Semarang telah merespons dengan mengembangkan strategi jemput bola, pembentukan tim sosialisasi khusus, serta kolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi, meskipun hasil signifikan belum terlihat dalam jangka pendek.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program aktivasi IKD di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah telah berjalan namun masih belum optimal. Hal ini tercermin dari capaian aktivasi yang baru mencapai 7,06%, masih jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Berdasarkan empat dimensi efektivitas menurut Budiani (2007): ketepatan sasaran telah diarahkan pada kelompok potensial namun belum menjangkau seluruh segmen masyarakat; sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai media namun intensitas dan pemahaman masyarakat masih terbatas; tujuan program telah memberikan kemudahan bagi yang telah mengaktivasi namun pemanfaatan masih belum luas; dan pemantauan berbasis data telah berjalan namun belum mampu mendorong percepatan capaian secara signifikan. Keempat temuan ini dikonfirmasi oleh output analisis NVivo 12 yang menunjukkan kata-kata dominan pada setiap dimensi: Kelompok pada ketepatan sasaran, Sosialisasi dan Belum pada sosialisasi program, Masyarakat dan Praktis pada tujuan program, serta Aktivasi dan Kecamatan pada pemantauan program.

Disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan, memperluas pelayanan jemput bola ke desa-desa dan pusat keramaian, mendorong integrasi

IKD dengan berbagai layanan publik daerah, serta memperkuat kapasitas SDM pelaksana. Kepada Pemerintah Kabupaten Semarang disarankan untuk mengintegrasikan IKD sebagai syarat akses layanan publik tertentu agar masyarakat terdorong untuk melakukan aktivasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian sehingga penelitian juga hanya dilakukan pada lokus satu kabupaten dengan pendekatan kualitatif..

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work).* Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif antar kabupaten/kota di Jawa Tengah atau menggunakan mixed methods, serta mengkaji faktor kepercayaan publik (public trust) dan keamanan data sebagai variabel tambahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berharga, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alfianti, N., & Wahyudi, K. E. (2024). Efektivitas Aplikasi Klampid New Generation dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Wonokusumo. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 713–730. https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.164

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna" eka taruna bhakti" desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, *1*(2), 43816.

Chohan, S. R., & Hu, G. (2022). Strengthening digital inclusion through e-government: Cohesive ICT training programs to intensify digital competency. Information Technology for Development, 28(1), 16–38. https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1841713

Duan, Y., & Dong, X. (2025). Does digital literacy matter for e-government usage behavior? An empirical analysis based on data from rural women in China. SAGE Open, 15(1). https://doi.org/10.1177/21582440251376118

Gatiningsih, Djohan, T. S., Syaputra, R., Mulianingsih, S., Munawaroh, N., Arifin, T. S., Tobing, A., & Beu, F. (2022). STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN AKTE KEMATIAN BERBASIS DIGITAL DI KOTA MEDAN. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1012

Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan Dokumen Paket Kematian Melalui Program Sedudo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 106–124. https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743

Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta.

Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro. Kebijakan: *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 271–283. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309

Nabilla, C. R. Y., & Prasetyawan, A. (2023). Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Aplikasi Poedak di Dispenduk Capil Kabupaten Gresik). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 1(3), 429–438.

https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/26189
Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nababan, W., & Situmorang, E. G. V. (2023). Strategi Peningkatan Keefektifan Mal Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sumedang Menggunakan Analisis Soar Dan Matriks Qspm. Jurnal Registratie, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3343
Naghmouchi, M., Laurent, M., Levallois-Barth, C., & Kaaniche, N. (2025). Perspectives on national digital identity systems. Blockchain: Research and Applications, Article 100429. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100429
Permadi, Ikhsan Bagus, and Ali Rokhman. 2023. "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 4(2):80–88. https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199
Riskasari, & Ibrahim, M. A. (2025). The impact of electronic identity cards and the digitalization of certificates on public service effectiveness: A literature review. *KnE Social Sciences*, 10(18), 1327–1347. https://doi.org/10.18502/kss.v10i18.19559
Salahudin, Salahudin, Achmad Nurmandi, and Mohammad Jafar Loilatu. 2020. "How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia?" *Jurnal Studi Pemerintahan* 11(3). https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.164
Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, *5*(3148), 69-86. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148
Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming Public Service Delivery: A Comprehensive Review of Digitization Initiatives. *Sustainability*, *16*(7), 2818. https://doi.org/10.3390/su16072818
Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta
Wardani, D. P. K., & Isbandono, P. (2024). Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital dalam Menunjang Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kelurahan Pagesangan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 2(3), 147–160.